

EFEKTIVITAS PENERAPAN B-DISO (BANYUWANGI *DIGITAL SOCIETY*) DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)

Prilly Resa Arinda, Suryadi, Romula Adiono

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: prillyresa@yahoo.com

Abstract: *Effectiveness of B-DiSo (Banyuwangi Digital Society) Implementation in Improving Quality of Education Service (Studies in Dinas Pendidikan Banyuwangi).* The development of information and communication technology have a positive impact on the course of government and help the bureaucrats to maximize their duties as public officials. These conditions make Local Government of Banyuwangi produced a regional innovation program themed B-DiSo (Banyuwangi Digital Society). The results of the study indicate that the application of B-DiSo policy taken by Local Government of Banyuwangi is inappropriate policies. It is seen from the application of the SIAP online in Banyuwangi which has not reached the optimal point. The policy implementers less sensitive and less knowing that the majority of people in Kabupaten Banyuwangi can not use digital-based service system, so that only a small percentage of people are able to use information and communication technologies that can benefit from this policy. That which led the development of information and communication technology in Banyuwangi has not reached in effectiveness nowadays.

Keywords: *effectiveness, implementation SIAP (Education Information System Application) online*

Abstrak: Efektivitas Penerapan B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Bidang Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif terhadap berlangsungnya pemerintahan dan membantu para birokrat untuk memaksimalkan tugasnya sebagai pejabat publik. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghasilkan suatu program inovasi daerah bertema B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan B-DiSo yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Hal tersebut terlihat dari penerapan SIAP *online* di Kabupaten Banyuwangi yang belum mencapai titik optimal. Pihak pelaksana kebijakan kurang peka dan kurang mengetahui bahwa mayoritas keadaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi belum bisa menggunakan sistem pelayanan yang berbasis *digital*, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang bisa merasakan manfaat dari kebijakan ini. Hal tersebut yang menyebabkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Banyuwangi belum mencapai efektivitasnya sampai saat ini.

Kata kunci: efektivitas, penerapan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online*

Pendahuluan

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Pemerintah diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya (terutama mereka yang harus melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti misalnya berbisnis di dalam sebuah pasar terbuka dan perdagangan bebas), lebih memperbaiki kinerja, birokrasi dan administrasinya agar mutu

pelayanan kepada masyarakat dan mereka yang berkepentingan membaik secara signifikan. Berdasarkan keadaan tersebut, teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukkan peranannya. Karena pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, maka jelas terlihat bahwa teknologi yang paling cocok

untuk diterapkan disini adalah teknologi, informasi dan komunikasi. Namun, fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat adalah permasalahan mengenai kondisi masyarakat yang belum memaksimalkan *technology minded*, sebagian besar diantara mereka lebih suka untuk melakukan suatu hal secara konvensional. Selama ini, pemanfaatan oleh masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih cenderung untuk *basic service* belum memanfaatkan produktif untuk aktivitas yang mempercepat pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi secara umum.

Kondisi yang sedemikian, membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghasilkan suatu program inovasi daerah bertema Banyuwangi *Digital Society* (B-DiSo) yang diawali dari program *smart city* dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan, agama, pendidikan, perpajakan, pariwisata, dan sebagainya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara umum. Untuk mengimplementasikan program Banyuwangi *Digital Society*, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia yang berkomitmen untuk membangun Indonesia *Digital Network* (IDN), sesuai dengan “Visi Indonesia Maju 2030” yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia dan dirumuskan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, spiritnya adalah *breakthrough* atau terobosan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dalam hal pembangunan B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya membangun dan mengembangkan *content-content* antara lain *e-government*, *e-education*, *e-health*, *e-office*, ZIS (zakat, infaq, sedekah) *online*, 1.000 WiFi, infrastruktur. Satu *content* yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah mengenai *e-education*. Pengembangan program *e-education* ini tidak terlepas dari dukungan dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Dalam mendukung adanya program B-DiSo ini dinas pendidikan menerapkan program yang dinamakan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* di setiap sekolah.

Tugas utama Dinas Pendidikan dalam program B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*) ini adalah memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan harapan apabila menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, layanan secara umum bisa lebih efektif dan lebih

berkualitas. Karena dengan teknologi informasi dan komunikasi hambatan jarak, pendanaan, dan waktu bisa diminimalisir. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* dalam meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online*.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas proses pelaksanaan program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* dalam meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Manfaat penelitian sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam keberlanjutan implementasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi.

Tinjauan Pustaka

1. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Konsep Inovasi

Menurut Muluk (2008, h.43) yang dimaksud inovasi adalah “Instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif. Inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan dalam pelayanan publik”. Mulgan & Alburry yang dikutip oleh Muluk (2008, h.46) menjelaskan bahwa terdapat tiga kategorisasi level inovasi yaitu inovasi inkremental, inovasi radikal, dan inovasi transformatif.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (dikutip dari Widodo, 2013, h.96-107) mengajukan empat faktor atau

variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain:

a. Faktor komunikasi (*communication*)

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

b. Sumber daya (*resources*)

1) Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian);

2) Sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas;

3) Sumber daya peralatan (*facility*) merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

4. Pelayanan Publik

Menurut Bab I Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan merupakan suatu upaya strategis yang terencana dengan aspek-aspek tertentu. Sepuluh prinsip pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, kesepuluh prinsip tersebut antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan keramahan, serta kenyamanan.

5. E-Government

Menurut Akadun (2009, h.130) *Electronic administration* berkembang dengan mengadopsi *electronic business*, *electronic commerce*, *electronic market*. Yang lebih dulu mengaplikasikan teknologi tersebut dalam institusi bisnis dengan menggunakan jasa internet. Pelaksanaan *electronic government* dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya *electronic government* menurut Indrajit (2002, h.5) antara lain:

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;

c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan

e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan global dan *trend* yang ada; serta

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

6. Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Handayani-ningrat (1995, h.16) adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Budiani (2007, h.53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel antara lain ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program. Sementara menurut pendapat Gibson yang dikutip oleh Kurniawan (2005, h.107) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- d. Perencanaan yang matang;
- e. Penyusunan program yang tepat;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

7. Pengertian dan Konsep B-DiSo

B-DiSo merupakan hasil dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas dengan pihak PT Telekomunikasi Indonesia. Konsep tersebut dinamakan *Digital Society* yang berusaha menciptakan ekosistem-ekosistem yang *digital friendly*. Dalam hal pembangunan B-DiSo Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya membangun dan mengembangkan *content-content* antara lain pembangunan 10.000 titik akses *WiFi*, peluncuran layanan *e-office*, *e-health*, *e-education*, peluncuran layanan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) *online*.

8. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) Online

SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* merupakan layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan *online* yang menghubungkan orang tua, siswa, guru, sekolah, dinas daerah dan pusat secara terpadu dan akuntabel untuk kemajuan pendidikan Indonesia. SIAP *online* mampu mengelola data dan informasi pendidikan dengan lebih cepat, mudah, akurat, terpadu dan berkesinambungan dari mulai tingkat sekolah, dinas pendidikan kota, kabupaten, provinsi, hingga pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Beberapa kelebihan dari SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* yaitu:

- a. Sistemnya serba *online* dan *real-time* dapat diakses setiap saat dan dari mana saja;
- b. Biaya terjangkau dan minim investasi/modal;
- c. Aplikasinya nyaman dan lengkap sesuai kebutuhan setiap pengguna;
- d. Skalabilitas tinggi, aman, handal, mudah dan cepat diimplementasikan;
- e. Terintegrasi dengan beragam fasilitas dan layanan *online* lainnya;
- f. Satu *login* pengguna untuk akses seluruh layanan yang tersedia;
- g. Fleksibel dan *uptodate* mengikuti perkembangan aturan pendidikan di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan yang dikutip oleh Suyanto dan Sutinah (2010:166), penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) efektivitas program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* di Kabupaten Banyuwangi; (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online*. Lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi dan situs penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model Interaktif menurut Miles dan Hubberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010, h.246-252). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Efektivitas Program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) Online di Kabupaten Banyuwangi

a. Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan SIAP Online

Penerapan kebijakan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* di

Kabupaten Banyuwangi ini merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur, sekaligus juga menjadi media informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konseptual merupakan suatu kebijakan yang tepat. Bekerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia sebagai penyedia jasa layanan merupakan suatu langkah yang tepat karena tidak mungkin dalam pelayanan publik pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Keunggulan yang dimiliki oleh produk SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* juga mempermudah pihak pengguna untuk memahami dan menggunakannya untuk mengakses data administrasi sekolah.

b. Kegunaan atau Manfaat SIAP Online

Prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah dijelaskan di atas telah cukup untuk digunakan pedoman bagi pelaksanaan SIAP *online* di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi fakta yang terjadi menunjukkan bahwa manfaat SIAP *online* belum dirasakan manfaatnya secara keseluruhan, hanya sebatas pengisian profil sekolah, data guru, data *staff*, dan data siswa. Untuk *update* nilai ulangan harian atau nilai rapor belum terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa manfaat SIAP *online* belum dirasakan bagi pihak pengguna. Selama satu tahun berjalan, program ini masih memerlukan waktu untuk sampai hal yang maksimal dalam artian aplikasi yang terdapat di SIAP *online* bisa lebih dimanfaatkan lagi oleh sekolah, guru, siswa, dan orang tua dan hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sangat diperlukan untuk mendorong setiap sekolah agar bisa lebih memanfaatkan SIAP *online* dalam meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan.

c. Sosialisasi dalam Pelaksanaan Program SIAP Online

Tahap komunikasi kebijakan atau yang sering disebut dengan sosialisasi, telah dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Banyuwangi sebagai penanggung jawab program pengembangan B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*) dalam bidang pendidikan. Sosialisasi merupakan penentu apakah suatu program pemerintah daerah akan berhasil atau tidak kedepannya. Sosialisasi merupakan tahap awal dari implementasi kebijakan yaitu bagaimana pihak Dinas Pendidikan Banyuwangi menginformasikan kepada seluruh sekolah bahwa terdapat program aplikasi *online* untuk mengelola administrasi sekolah, tidak hanya menginformasikan saja

tetapi dinas pendidikan juga harus menjelaskan secara detail bagaimana dan apa yang menjadi isi, tujuan, arah dari program tersebut supaya pihak pengguna yaitu sekolah dan masyarakat (guru, siswa, orang tua) dapat mengikuti dan mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan program baru tersebut.

d. Pencapaian dan Ketepatan dalam Program SIAP Online

Pencapaian dan ketepatan dalam program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* merujuk kepada bagaimana efektivitas penerapan program tersebut terhadap peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan ukuran efektivitas yang digunakan, kebijakan penerapan SIAP *online* di Kabupaten Banyuwangi ini secara konseptual memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi fakta yang terjadi menunjukkan bahwa analisis dan proses perumusan kebijakan belum cukup baik, hal tersebut dikarenakan program SIAP *online* ini dijalankan hanya mengikuti instruksi dari Bupati Banyuwangi untuk mengembangkan program inovasi yaitu B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*). Penerapan program ini cenderung tidak ada kejelasan berawal dan perumusan kebijakannya seperti apa, karena terkesan hanya mendukung program B-DiSo yang merupakan program pemerintah daerah.

Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga mempunyai kondisi geografis yang berbeda-beda di tiap kecamatan serta kondisi sekolah yang berbeda, sehingga terlihat bahwa penerapan program secara *online* ini kurang tepat karena hanya menimbulkan kesenjangan sosial antara sekolah yang maju dan sekolah yang berada di daerah terpencil. Kendala-kendala seperti itu yang membuat program ini berjalan kurang efektif dan terkesan hanya program yang mengikuti dan mendukung program induk dari Bupati Banyuwangi.

e. Pemantauan dalam Pelaksanaan Program SIAP Online

Dinas pendidikan hanya bisa memantau *valid* atau tidaknya suatu pelaporan melalui akun SIAP dinas. Misalnya ketika salah satu sekolah mengentri data pelaporan BOS atau SAS tiap triwulan, maka operator yang berada di dinas pendidikan melapor kepada pihak dinas, lalu pihak dinas akan menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi pemantauan program SIAP *online* berjalan atau tidaknya bisa dilihat dari akun SIAP dinas yaitu bagaimana kelengkapan

data administrasi sekolah berdasarkan prosentase dan bagaimana *valid* atau tidaknya pelaporan-pelaporan terkait dengan keuangan.

f. Penerimaan atau Perilaku Pihak Pengguna terhadap SIAP Online

Pihak sekolah-sekolah yang berlangganan SIAP *online* menyatakan sudah membayar kontrak berlangganan senilai dengan yang tertera pada nota kesepahaman antara pihak dinas pendidikan dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan kontrak tersebut selama satu tahun masa penggunaan. Tetapi fakta menunjukkan bahwa aplikasi tersebut hanya digunakan untuk PPDB *online* yang berjalan selama 3-4 hari selama satu tahun dan hanya digunakan untuk pendaftaran siswa baru. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak sekolah merasa merugi karena hanya digunakan untuk PPDB *online*.

Pihak operator sekolah juga mengeluh bahwa ketika mengentri data pelaporan BOS dan SAS, mereka harus mengentri ulang dan hal tersebut membutuhkan waktu berhari-hari. Selain itu, terlalu banyak aplikasi pendataan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sehingga operator sekolah menjadi bingung dan enggan menggunakan aplikasi SIAP *online*. Karena waktu yang tidak mencukupi dan berdekatan dengan *deadline* pengumpulan pendataan, serta tidak adanya kejelasan instruksi dari dinas pendidikan terkait kelanjutan penggunaan program SIAP *online* untuk pengisian administrasi sekolah.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program SIAP Online di Kabupaten Banyuwangi

a. Faktor Pendukung yang Mencakup:

1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* yaitu PC/laptop dan koneksi internet karena aplikasi ini berbasis *website*. Hal tersebut akan memudahkan pihak pengguna dalam menggunakan aplikasi SIAP *online* karena tidak perlu susah-susah untuk menyediakan sarana dan prasarana. Pihak pengguna hanya perlu membuka *website* dan *login* menggunakan akun masing-masing dengan memasukkan *username* dan *password*.

2) Peraturan yang Mendukung Pelaksanaan SIAP Online

Peraturan yang mendukung pelaksanaan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, peraturan tersebut telah tertera dalam Nota Kesepahaman bersama yang telah ditandatangani dan diresmikan oleh kedua belah pihak yaitu Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan pihak PT Telekomunikasi Indonesia. Dalam

Nota Kesepahaman tersebut telah dijelaskan bahwa tujuan dari penerapan SIAP *online* di lingkungan dinas pendidikan ini adalah untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara umum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Faktor Penghambat yang Mencakup:

1) Permasalahan Teknis Pengoperasian SIAP Online

Permasalahan teknis pengoperasian pada program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* adalah terkait dengan jaringan koneksi internet. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis di Kabupaten Banyuwangi memang berbeda-beda dan ketika pemasangan akan dilakukan di daerah terpencil, akan memerlukan jaringan internet khusus yang akan dibantu oleh penyedia jasa layanan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia. Sejauh ini, selama program berlangsung nampak ada kesenjangan antara sekolah terpencil dan sekolah yang berada di daerah kecamatan atau kabupaten dan hal tersebut disebabkan oleh koneksi internet yang memang tidak memungkinkan untuk dipasang di daerah terpencil.

2) Penguasaan Pengguna Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa memang sumber daya manusia pada masing-masing sekolah sebagai instansi pengguna belum memadai. Hal tersebut terlihat dari jumlah operator sekolah yang ada di tiap-tiap sekolah hanya berjumlah satu orang dan satu orang tersebut akan mengelola, mengatasi, mengerjakan begitu banyak aplikasi pendataan yang merupakan instruksi dari dinas pendidikan ataupun langsung dari pusat. Sehingga para operator menjadi kewalahan mengatasi hal tersebut.

Terlebih lagi pada jenjang yang lebih rendah yaitu SD, operator sekolah di SD itu tidak ada, jadi guru yang ahli dan menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi yang merangkap menjadi operator sekolah. Dan hal tersebut tampak sangat merugikan waktu guru tersebut, karena waktu fokus mengajar yang dimiliki oleh guru tersebut akan berkurang dan digunakan untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi pendataan.

3) Keterbatasan Jumlah Anggaran

Keterbatasan anggaran ini terutama terjadi pada pihak instansi pengguna yaitu sekolah yang berada pada jenjang SD. Pada jenjang SD, anggaran yang digunakan untuk berlangganan SIAP *online* tidak boleh diambil dari dana BOS, sehingga sekolah harus mengupayakan dana tersendiri untuk kontrak berlangganan selama satu tahun. Selain itu, pihak operator di jenjang

SD juga mengaku bahwa tidak adanya insentif dari Pemerintah Daerah kabupaten Banyuwangi untuk para operator yang membuat mereka enggan atau bermalas-malasan mengerjakan aplikasi pendataan di SIAP *online*. Begitu juga halnya yang terjadi pada sekolah yang belum memiliki siswa yang berjumlah banyak sehingga kesulitan dana untuk berlangganan SIAP *online*. Dengan demikian akan terjadi kesenjangan sosial antara sekolah yang mampu secara finansial dan yang tidak mampu dan hal tersebut berdampak pada pemberian dan peningkatan mutu pelayanan di bidang pendidikan.

Kesimpulan

Kebijakan yang diambil oleh Bupati Banyuwangi yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan pada kenyataannya bukan merupakan kebijakan yang tepat. Terlihat dengan penerapan SIAP *online* di Kabupaten Banyuwangi yang belum mencapai titik optimal. Selain itu, kebijakan penerapan SIAP *online* ini terkesan membuang biaya dengan percuma karena aplikasi yang digunakan hanyalah untuk PPDB *online* yang hanya berlangsung selama 3 hari penggunaan. Untuk pengisian data akademik maupun pelaporan keuangan belum dilakukan

secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kebijakan penerapan SIAP *online* ini hanya diterapkan guna mendukung program dari Bupati Banyuwangi yaitu B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*) sehingga pihak dinas pendidikan intinya hanya mengikuti instruksi dari pimpinan.

Kebijakan penerapan program B-DiSo (Banyuwangi *Digital Society*) terkesan hanyalah sebagai ambisi dari pihak pimpinan, hal tersebut terlihat dari terhambatnya pengembangan konten-konten yang berbasis *digital friendly*, salah satunya adalah penerapan SIAP *online*. Pihak pelaksana kebijakan pada dasarnya kurang peka dan kurang mengetahui bahwa mayoritas keadaan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi belum bisa menggunakan sistem pelayanan yang berbasis *digital*, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang bisa merasakan manfaat dari kebijakan ini. Hal tersebut yang menyebabkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Banyuwangi belum mencapai efektivitasnya sampai saat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan program SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan) *online* selama satu tahun ini belum bisa dikatakan efektif.

Daftar Pustaka

- Akadun (2009) **Teknologi Informasi Administrasi**. Bandung, Alfabeta.
- Bagong, Suyanto, dan Sutinah. (2010) **Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan**. Jakarta, Kencana.
- Budiani, Ni Wayan. (2007) Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. [Internet], 2 (1). Diunduh dari: <<http://www.pdfio.com/k-1921809.html>> [Diakses pada 28 Februari 2014].
- Handyaningrat, Soewarno. (1995) **Azas-azas Manajemen Organisasi**. Jakarta, Mas Agung.
- Indrajit, Richardus E. (2002) **Electronic Government**. Yogyakarta, Andi.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 **Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik**. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kurniawan, Agung. (2005) **Transformasi Pelayanan Publik**. Yogyakarta, Pembaruan.
- Muluk, Khairul M.R. (2008) **Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah**. Malang, Bayumedia Publishing.
- Sugiyono (2010) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Cetakan ke-11. Bandung, Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 **Tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 **Tentang Pelayanan Publik**. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia
- Widodo, Joko M.S. (2013) **Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)**. Malang, Bayumedia Publishing.